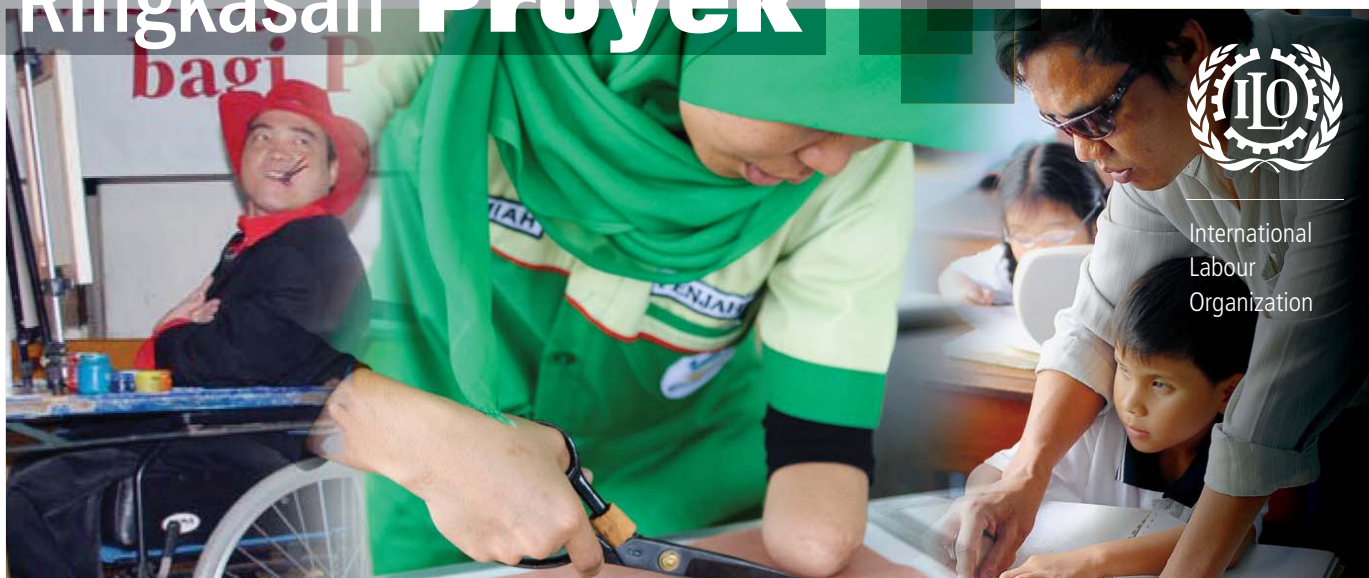


Ringkasan **Proyek**



Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Para Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundangan (PROPEL – Indonesia)

Tujuan Jangka Panjang	Terciptanya lapangan dan peluang kerja yang lebih baik bagi laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas, melalui pembentukan kebijakan dan kerangka hukum yang mendukung dan mempromosikan peluang untuk mengembangkan keterampilan serta upaya menghapuskan diskriminasi.
Tujuan Jangka Menengah	• Terciptanya lingkungan kebijakan dan hukum yang mendukung peluang kerja dan pelatihan yang lebih baik bagi para penyandang disabilitas. • Peningkatan kesadaran dan kapasitas para konstituen guna menanggapi non-diskriminasi dan hambatan terhadap kesetaraan peluang kerja bagi para penyandang disabilitas.
Mitra Utama	■ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ■ Kementerian Sosial ■ Organisasi Pekerja dan Pengusaha ■ Organisasi Penyandang Disabilitas ■ Universitas ■ Media Massa
Jangka Waktu	2 tahun (2012– 2013)
Cakupan Geografis	PROPEL-Indonesia akan bekerja aktif di tingkat nasional, serta di dua provinsi prioritas dalam Program Pekerjaan Layak Nasional, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Timur. Proyek pun bekerja di Jawa Barat.
Donor	 Irish Aid Department of Foreign Affairs An Roinn Gnóthaí Eachtracha
Anggaran	USD 209,454
Kontak	Yohanis Pakereng Koordinator Proyek yohanis@ilo.org

Latar Belakang Proyek

Pekerjaan yang layak adalah tujuan utama ILO bagi semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. ILO telah bekerja selama lebih dari 50 tahun untuk mendorong pengembangan keterampilan dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan pada prinsip-prinsip peluang dan perlakuan yang setara serta pengarusutamaan kedalam rehabilitasi pendidikan



kejuruan. Walaupun terdapat kemajuan dalam mendorong hak-hak para penyandang disabilitas, mereka masih menghadapi diskriminasi dan hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dari sekitar 1 juta orang dengan disabilitas, setidaknya 750 juta berada di kelompok usia kerja. Mereka hanya memiliki sedikit akses ke pelatihan keterampilan, memiliki kemungkinan lebih besar untuk tidak bekerja ataupun memiliki penghasilan lebih sedikit dibandingkan orang-orang tanpa disabilitas, khususnya apabila mereka adalah



perempuan. Selain itu, banyak juga yang bekerja di perekonomian informal dan tak terlindungi.

Sejak tahun 2001, Program Kemitraan ILO-Irish Aid telah bekerja di beberapa negara Asia Tenggara dan Afrika Selatan guna mendorong pekerjaan yang layak dan kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas melalui lingkungan kebijakan dan hukum yang mendukung, serta dengan menyediakan pelatihan pengembangan kewirausahaan dan akses atas layanan-layanan terkait, dengan penekanan khusus pada perempuan penyandang disabilitas. Program ini juga telah mendorong keikutsertaan penyandang disabilitas bersama dengan bukan penyandang disabilitas dalam program-program dan layanan-layanan terkait dengan promosi kerja serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Indonesia pada tahun 1999 telah meratifikasi Konvensi mengenai Diskriminasi (dalam Pekerjaan dan Jabatan) tahun 1958 (No. 111). Meskipun demikian, Indonesia belum meratifikasi Konvensi mengenai Rehabilitasi Kejuruan dan Kesempatan Kerja (Penyandang Disabilitas) (No. 159). Pada Oktober 2011, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). Ratifikasi dari Konvensi PBB, yang mempromosikan perlakuan setara terhadap penyandang disabilitas, merupakan langkah penting menuju perbaikan hak-hak para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas diakui sebagai salah satu kelompok paling rentan di Indonesia, yang menghadapi diskriminasi dalam akses atas pendidikan, pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja. Peraturan yang berlaku saat ini—Undang-Undang No. 4/1997 mengenai Penyandang Disabilitas, dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 43/1998 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 205/1999—terfokus pada ketentuan-ketentuan kesejahteraan sosial. Sementara sistem kuota telah ditempatkan guna mendorong peluang kerja dalam pasar tenaga kerja terbuka, namun peraturan belum diadopsi untuk mendorong hasil nyata dari kewajiban ini, sehingga akhirnya sistem kuota tersebut belum dilaksanakan.

Dalam tahap ini, Program Kemitraan global (2012-13) *Mendorong Hak-hak dan Peluang untuk Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundangan* (PROPEL–Indonesia) akan mendukung Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan utama lainnya guna menanggapi hambatan-hambatan bagi peluang kerja yang setara, serta mendorong pengikutsertaan dari penyandang disabilitas.

Strategi Proyek

I. Memperbaiki Kebijakan dan Kerangka Hukum

PROPEL-Indonesia bertujuan untuk mendukung upaya menanggapi kesenjangan dalam kebijakan dan perlindungan hukum mengenai kesempatan kerja dan pelatihan bagi penyandang disabilitas guna memastikan bahwa semuanya konsisten dengan standar-standar internasional. Dukungan akan diberikan melalui penyediaan nasihat dan dukungan teknis ke pemerintah, berkonsultasi dengan pemangku kepentingan utama, melalui lokakarya di tingkat nasional dan provinsi guna mempertimbangkan temuan-temuan kajian yang akan dilaksanakan dan memutuskan tindakan-tindakan apa yang diperlukan; dan melalui bantuan teknis dalam menindaklanjuti lokakarya-lokakarya ini, sehingga memberikan dampak pada keputusan yang diambil.

II. Membangun kapasitas Para Konstituen

PROPEL-Indonesia bertujuan untuk membangun kapasitas para pemangku kepentingan utama dalam Pemerintahan, serikat pekerja, organisasi pengusaha dan organisasi masyarakat sipil, di tingkat nasional dan provinsi (kabupaten/kota). Guna meningkatkan pemahaman atas hak-hak penyandang disabilitas terkait dengan kesempatan kerja dan pelatihan, serta ketentuan-ketentuan UNCRPD dan Konvensi ILO mengenai Rehabilitasi Kejuruan dan Kesempatan Kerja (No. 159), peningkatan kapasitas akan dilakukan melalui pelatihan dan lokakarya di tingkat nasional dan provinsi.

III. Mendukung advokasi dan peningkatan kesadaran

PROPEL--Indonesia akan mendukung kegiatan-kegiatan advokasi dan peningkatan kesadaran dengan menargetkan masyarakat umum, dan pemangku kepentingan, seperti media, pusat-pusat pelatihan, badan rekrutmen dan penempatan (jasa tenaga kerja) dan organisasi masyarakat sipil, di tingkat nasional dan provinsi.

Mengingat media memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir masyarakat umum, sebagai upaya peningkatan kesadaran dan advokasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang efektif, PROPEL-Indonesia akan berupaya untuk membangun kapasitas dan meningkatkan kesadaran dari perwakilan media. Selain itu, dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran atas hak-hak penyandang disabilitas di antara para mahasiswa/i dan para calon praktisi hukum, proyek ini akan memfasilitasi dimasukkannya peraturan perundang-undangan mengenai disabilitas kedalam kurikulum mata kuliah hukum di universitas terkemuka dan menyediakan dukungan untuk mendorong penelitian-penelitian terkait dengan disabilitas diantara para mahasiswa/i dan staf jurusan hukum.

Keluaran Proyek yang Dirumuskan

Berikut adalah keluaran-keluaran yang diharapkan dari implementasi tujuan proyek:

- Mendukung kajian dan revisi undang-undang nasional mengenai disabilitas terkait dengan kesempatan kerja dan peluang pelatihan;
- Finalisasi analisis situasi penyandang disabilitas, termasuk analisis mengenai hambatan-hambatan ke peluang pelatihan ketarampilan dan kejuruan bagi penyandang disabilitas;
- Menerbitkan laporan-laporan ILO, publikasi dan perangkat tentang pengikutsertaan (inklusi) disabilitas terkini dalam Bahasa Indonesia;
- Penyelesaian lokakarya dan pelatihan untuk Konstituen dan pemangku kepentingan utama mengenai non-diskriminasi dan peluang kerja setara untuk penyandang disabilitas di tingkat nasional dan provinsi;
- Sosialisasi panduan yang mudah digunakan dan praktis dalam Bahasa Indonesia guna mendukung para Konstituen dalam manajemen disabilitas terkait dengan kesempatan kerja untuk penyandang disabilitas;
- Mendukung perwakilan media dalam pergeseran ke pendekatan berbasis hak dalam peliputan media dengan artikel-artikel yang menampilkan seputar hak-hak penyandang disabilitas; dan
- Bantuan untuk memasukkan hukum mengenai disabilitas kedalam kurikulum fakultas hukum di setidaknya satu universitas terkemuka di Indonesia.

Pencapaian Terkini

- Konsultasi dan berbagi pengetahuan dengan penyandang disabilitas, termasuk organisasi penyandang disabilitas di tingkat regional, nasional dan daerah, organisasi internasional lainnya, lembaga pelatihan serta pemangku kepentingan lain yang menangani masalah disabilitas.
- Kemitraan dengan Universitas Katholik Atma Jaya dalam meningkatkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas di kalangan mahasiswa hukum serta menyusun rencana untuk memasukkan hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam hal pekerjaan dan ketenagakerjaan, pada mata kuliah hak asasi manusia di Fakultas Hukum.
- Pemaparan dan pengkajian hasil temuan awal mengenai peluang penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan kerja di Indonesia serta kebutuhan dan tantangan yang dihadapi organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan advokasi mereka.
- Menjangkau pabrik-pabrik garmen yang mempekerjakan atau tidak mempekerjakan penyandang disabilitas agar dapat membantu pemenuhan peraturan perundangan tentang kuota 1 persen, bekerja sama dengan Better Work Indonesia.